

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *TAX AVOIDANCE*
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN BANK YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2013-2016**



SKRIPSI

Disusun oleh :

PRASENDI HENDRY MAHADIKA

13312057

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *TAX AVOIDANCE*
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN BANK YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2013-2016**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Prasendi Hendry Mahadika

No. Mahasiswa: 13312057



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN MOTTO

“Prayer can change our destiny and goodness can extend our age”

*“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah
untuk dirinya sendiri”*

(QS. Al-Ankabut:6)

“Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rizki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik).”

(Prasendi Hendry Mahadika)

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Good Corporate Governance dan Tax Avoidance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam juga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan inspirasi bagi penulis dalam proses menyusun skripsi ini untuk dijadikan sebagai sarana ibadah di jalan Allah SWT dan semoga kita semua mendapat syafa'at dari beliau di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, petunjuk, arahan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang umat-Nya, yang selalu memberikan petunjuk, kemudahan, kesehatan, pemahaman serta pencerahan bagi setiap hamba-Nya tidak terkecuali kepada penulis.

2. Nabi Muhammad SAW, yang memberikan banyak ilmu dan ajaran untuk memahami kehidupan. Sungguh penulis termasuk orang-orang yang beruntung menjadi pengikutnya.
3. Kedua orangtuaku yang selalu membimbing dan menyayangi penulis, Bapak Pamungkas S.E, dan Ibu Titik Sugihati S.E, terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan disetiap sujud yang senantiasa menguatkan langkahku dan menghantarkan seluruh putra-putrinya menuju jenjang pendidikan yang tinggi.
4. Adik tercintaku Bellinda Elita Hapsari, yang secara tidak langsung memberiku semangat untuk sukses. Semoga esok kedepannya bisa sukses juga. Aamiin!
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dekar Urumsah, Drs. S.Si. M.Com, PhD selaku Ketua Prodi Akuntansi.
8. Bapak Drs. Yunan Najamudin, M.B.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis, yang selalu memberikan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik lagi.
9. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Islam Indonesia, khususnya Fakultas Ekonomi yang telah banyak memberikan banyak pengetahuan, pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh

pendidikan.

10. Sahabat penulis “Istri Idaman Squad” Beta Rizky Utami, Ivon Ashari Putri, Frysca Desy Ratnawati, Rani Shofiati Citranegara, Ayu Mustikaning Dewi, Annisa Ayu Nindya W dan Riskul Hanif yang sudah memberikan banyak canda tawa serta pelajaran hidup, membahagiakan penulis dikala sedih. Tanpa kalian kuliah akan terasa membosankan.
11. Rico Wahyu dan Adi selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi penulis dengan dosen pembimbing yang sama.
12. Terima kasih untuk Febri Beta K yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi selama ini.
13. Seluruh personil “Lambe Turah Squad” (alfian, sujatmiko, havri, handri, yoga, huda, sudarmono, gigih, azmi, dan alvin), terima kasih sudah bersedia menjadi teman penulis sejak semester awal hingga sekarang.
14. Aziz Herdiono yang selalu memberikan tumpangan tempat tinggal selama penulis mengerjakan skripsi.
15. Julius Dyas Cahyadi yang rela meminjamkan laptop demi kelancaran penulis dalam mengerjakan skripsi.
16. Squad “SOS” (Iqbal, Egar, Alan, Putra) yang menghambat proses kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Teman-teman KKN unit 123 senasib sepenanggungan (Erdha, Dhani, Ayuk, Dea, Hana, Ukhda, Ninda) yang selalu memberi kehangatan di tengah- tengah knn 123 kalian keluargaku
18. Terima kasih kepada seluruh anggota UKM Musik Leak 612, dengan adanya

kalian penulis dapat mengasah kemampuan dalam bidang musik. Selain itu dengan adanya UKM musik dapat menghilangkan kejenuhan selama penulis menjalankan pendidikan di kampus.

Semoga limpahan rahmat dan karunia Allah SWT selalu didapatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah membantu penulis selama ini. Skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena itu kritik, saran dan masukan sangat penulis butuhkan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

(Prasendi Hendry Mahadika)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 6 Juni 2018

Penulis,



(Prasendi Hendry Mahadika)

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *TAX AVOIDANCE*
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN BANK YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2013-2016**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

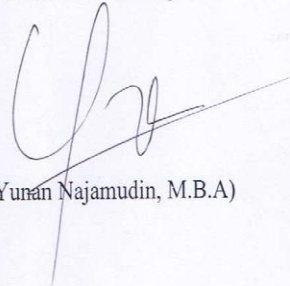
Nama: Prasendi Hendry Mahadika

No. Mahasiswa: 13312057

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 7/6/18

Dosen Pembimbing



(Drs. Yunan Najamudin, M.B.A)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN TAX AVOIDANCE TERHADAP
NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN BANK YANG TERDAFTAR DI BEI 2013-2016**

Disusun Oleh : **PRASENDI HENDRY MAHADIKA**
Nomor Mahasiswa : **13312057**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 25 Juli 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Yunan Najamuddin, Drs., MBA.

Penguji : Reni Yendrawati, Dra., M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Motto dan Persembahan	ii
Kata Pengantar	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	vii
Halaman Pengesahan	viii
Berita Acara Tugas Akhir	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	5
1.4 MANFAAT PENELITIAN	6
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	8
2.1 LANDASAN TEORI.....	8
2.1.1 <i>Good Corporate Governance</i>	8
2.1.2 Teori Keagenan	11
2.1.3 Nilai Perusahaan.....	12
2.1.4 Jumlah Dewan Komisaris	13
2.1.5 Proporsi Dewan Komisaris Independen	15

2.1.6 Kepemilikan Institusional	16
2.1.7 Komite Audit	17
2.1.8 <i>Tax Avoidance</i>	19
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	20
2.3 HIPOTESIS PENELITIAN.....	23
2.3.1 Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap nilai perusahaan.....	23
2.3.2 Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.....	24
2.3.3 Pengaruh kualifikasi doktoral dewan komisaris terhadap nilai Perusahaan.....	25
2.3.4 Pengaruh reputasi dewan komisaris terhadap nilai perusahaan ...	26
2.3.5 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan ...	26
2.3.6 Pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan	27
2.3.7 Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> terhadap nilai perusahaan.....	28
2.4 KERANGKA PENELITIAN	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN.....	31
3.2 VARIABEL PENELITIAN	31
3.2.1 Nilai Perusahaan.....	32
3.2.2 Jumlah Dewan Komisaris.....	32
3.2.3 Kualifikasi Doktoral	33
3.2.4 Reputasi Dewan Komisaris.....	33

3.2.5 Proporsi Dewan Komisaris Independen	34
3.2.6 Kepemilikan Institusional	34
3.2.7 Komite Audit	34
3.2.8 <i>Tax Avoidance</i>	35
3.3 ALAT STATISTIKA.....	36
3.3.1 Uji Statistik Deskriptif.....	36
3.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.3.2.1 Uji Normalitas	37
3.3.2.2 Uji Multikolienaritas	37
3.3.2.3 Uji Heterokedastisitas.....	37
3.3.3 Uji Autokorelasi.....	38
3.3.4 Analisis Linear Berganda.....	38
3.3.5 Uji Hipotesis	39
3.3.5.1 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	39
3.3.5.2 Uji statistik T.....	40
3.3.5.3 Uji statistik F	40
3.3.6 Hipotesa Operasional.....	41
BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	43
4.1 HASIL PENELITIAN	43
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	43
4.1.2 Analisis Deskriptif	44
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	46
4.1.3.1 Uji Normalitas	46

4.1.3.2 Uji Normalitas setelah Outlier.....	47
4.1.3.3 Uji Multikolinieritas	48
4.1.3.4 Uji Heterokedastisitas.....	49
4.1.4 Uji Autokorelasi.....	50
4.1.5 Uji Regresi Linear Berganda	51
4.1.6 Uji Hipotesis	54
4.1.6.1 Uji Koefisien Determinasi.....	54
4.1.6.2 Uji T	55
4.1.6.3 Uji F.....	57
4.2 PEMBAHASAN HIPOTESIS	57
4.2.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Pertama.....	57
4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Kedua	58
4.2.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Ketiga	59
4.2.4 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Keempat	60
4.2.5 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Kelima.....	61
4.2.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Keenam.....	62
4.2.7 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Ketujuh.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 KESIMPULAN	65
5.2 IMPLIKASI PENELITIAN	66
5.3 KETERBATASAN PENELITIAN.....	67
5.4 SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	69

LAMPIRAN	72
----------------	----

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	22
4.1.1	Sampel Penelitian	43
4.1.2	Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	44
4.1.3.1	Uji Normalitas.....	47
4.1.3.2	Uji Normalitas setelah Outlier	47
4.1.3.3	Hasil Uji Multikolinieritas	48
4.1.3.4	Hasil Uji Heterokedestisitas	49
4.1.4	Hasil Uji <i>Runs-Test</i>	50
4.1.5	Hasil Uji Regresi Berganda.....	51
4.1.6.1	Hasil Uji Koefisiaen Determinasi.....	54
4.1.6.2	Hasil Uji t-test.....	55
4.1.6.3	Hasil Uji F.....	57

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Penelitian	30
-----	---------------------------	----

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of good corporate governance and tax avoidance against the value of the company. The population in this research is the company the bank listed on the Indonesia stock exchange years 2013-2016. Sampling techniques using a purposive sampling method that generates the sample as many as 25 companies. Data collected with the use of secondary data from bank companies listed on the Indonesia stock exchange years 2013-2016. Methods of data analysis using descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the variables, the reputation of the Board of Commissioners Board of Commissioners, audit committee and tax avoidance does not affect the value of the company and the proportion of Board of Commissioners are independent, a doctoral qualification and ownership the institutional influence on the value of the company.

Keywords: good corporate governance, tax avoidance and the value of the company.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang menghasilkan sampel sebanyak 25 perusahaan. Data dikumpulkan dengan menggunakan data sekunder dari perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris, reputasi dewan komisaris, komite audit dan *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan proporsi dewan komisaris independen, kualifikasi doktoral dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci : *good corporate governance, tax avoidance* dan nilai perusahaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Berdirinya sebuah perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan setiap tahunnya. Nilai perusahaan yang tinggi akan berdampak kepada kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham (Kaluti dan Purwanto 2014). Tujuan utama sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan yang berorientasi bisnis adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan tidak hanya mencerminkan bagaimana nilai intrisik pada saat ini tetapi juga mencerminkan tujuan jangka panjang perusahaan tersebut dalam meningkatkan nilai kekayaannya di masa depan (Warapsari dan Suaryana 2016).

Good Corporate Governance mulai menjadi topik menarik di Indonesia pada tahun 1998 saat Indonesia mengalami krisis. Salah satu penyebab terjadinya krisis di Indonesia adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap direksi perusahaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Banyak bank yang bangkrut (dilikuidasi) karena kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan (Muryati dan Suardikha 2014). Para manajer perusahaan harus bersikap waspada, efisien dan efektif dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat dan menguntungkan bagi perusahaan di masa mendatang karena persaingan bisnis di era globalisasi ini semakin ketat.

Dalam berita online wartaekonomi.co.id (2017), PT Bank Permata Tbk (BNLI) mengalami penurunan pendapatan yang berasal dari bunga dan usaha

syariah dari 6,19 triliun menjadi 5,88 triliun pada tahun 2015 sampai 2016, serta mengalami rugi bersih pada tahun 2016 sebesar 6,48 triliun. Padahal pada tahun sebelumnya PT Bank Permata Tbk (BNLI) memperoleh laba bersih sebesar 247,11 miliar. Pada 2015 kerugian penurunan nilai tersebut tercatat hanya sebesar Rp3,67 triliun. Di 2016 nilainya melejit menjadi Rp12,20 triliun. Artinya, rugi akibat penurunan nilai aset keuangan tersebut meningkat 231,9%. Hal ini menjadi masalah besar pada kinerja keuangan (BNLI) karena melonjaknya nilai kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu *Good Corporate Governance* dengan proksi dewan komisaris, dewan komisaris independen, kualifikasi doktoral, reputasi dewan, kepemilikan institusional, komite audit dan *Tax Avoidance*.

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan data perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen, dengan demikian, komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (direksi). Dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak/institusi diluar manajerial yang umumnya bertindak sebagai

pihak yang memonitor perusahaan. Komite Audit adalah suatu komite yang anggotanya merupakan anggota dewan komisaris yang terpilih yang memiliki tanggungjawab untuk membantu menetapkan auditor independen terhadap usulan manajemen. *Tax Avoidance* merupakan aktifitas penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara tidak melanggar undang-undang yang berlaku di suatu negara dengan arti lain bahwa *tax avoidance* merupakan suatu aktifitas yang legal dan aman bagi wajib pajak karena aktifitas ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang serta peraturan pajak (Karimah dan Taufiq 2013).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas masalah nilai perusahaan. Di Indonesia penelitian yang berkaitan dengan *good corporate governance* dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan antara lain telah diteliti oleh Angraini (2013) tentang Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Textile, Garment yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009-2012. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan adalah dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah komite audit.

Muryati dan Suardikha (2014) tentang Pengaruh *Corporate Governance* pada Nilai Perusahaan, *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol Ukuran Perusahaan dan Leverage pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap Nilai

Perusahaan dengan variabel kontrol Ukuran Perusahaan, Jenis industri, Profitabilitas, dan Leverage pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010.

Karimah dan Taufiq (2013) tentang Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan, *tax avoidance* jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* jangka panjang, sedangkan *tax avoidance* jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Anggoro (2015) tentang Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi sebagai Variabel Moderating, bahwa perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah positif.

Dari penelitian terdahulu diketahui bahwa hasil penelitian tidak konsisten. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Angraini (2013). Pembaruan dalam penelitian ini adalah menambah variabel *tax avoidance* dan rasio kepemilikan institusional pada variabel *good corporate governance*, tetapi tidak menggunakan variabel ukuran perusahaan karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan selama periode 2013-2016.

Dalam penelitian ini terdapat variabel *good corporate governance* dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, serta pengamatan dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2016. Judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Tax Avoidance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2016”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah kualifikasi doktoral dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah reputasi dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
6. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
7. Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap nilai perusahaan
2. Untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan
3. Untuk menganalisis pengaruh kualifikasi doktoral terhadap nilai perusahaan
4. Untuk menganalisis pengaruh reputasi dewan terhadap nilai perusahaan
5. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan
6. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan
7. Untuk menganalisis pengaruh *Tax Avoidance* terhadap nilai perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perusahaan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Tax Avoidance* terhadap nilai perusahaan.

2. Bagi Investor

Untuk memberikan informasi kepada investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam melakukan penelitian yang sama.

4. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan, serta melatih penulis dalam menerapkan teori yang telah di dapat dalam bangku kuliah.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Good Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Wedyanthi dan Darmayanti 2016). Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan.

Tujuan dari diterapkannya *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) maksud dan tujuan *Good Corporate Governance* Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terciptanya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat

mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Adapun prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance* dalam Undang Undang No.40 Tahun 2007 oleh kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam menjalankan perusahaan, dan dalam Keputusan Menteri BUMN Tahun 2002, tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* harus mencerminkan sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan yang mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keahlian dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kaihatu (2006) mengungkapkan bahwa Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Good Corporate Governance memiliki mekanisme yang terdiri dari mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal merupakan cara mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal meliputi rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, pertemuan *board of director*, manajerial, kompensasi eksekutif serta komite audit sedangkan mekanisme eksternal meliputi pengendalian oleh pasar, *level debt financing*, dan audit eksternal..

2.1.2 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (disebut dengan *agent*) dengan pemilik (disebut dengan *principal*). Agar hubungan kontrak dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasi otoritas pembuatan keputusan kepada manajer.

Perencanaan kontrak yang tepat dimaksudkan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan.

Teori Keagenan memunculkan argumentasi terhadap adanya konflik antara pemilik yaitu pemegang saham dengan para manajer. Konflik tersebut muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Hubungan keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu atau lebih individu, yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut (Brigham dan Houston 2006 dalam Pertiwi dan Ferry 2012).

Dalam perkembangan selanjutnya, teori keagenan (*agency theory*) mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *Corporate Governance* berkembang dengan bertumpu pada *Agency Theory* yang mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin 2009 dalam Pertiwi dan Ferry 2012).

2.1.3 Nilai Perusahaan

Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan karena dengan dimaksimalkannya nilai perusahaan, maka akan semakin meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Dengan meningkatnya nilai

perusahaan, maka para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut.

Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. Suatu perusahaan akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaannya,. Peningkatan nilai perusahaan biasanya ditandai dengan naiknya harga saham di pasar (Amanti 2015). Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham meningkat. Semakin tinggi harga saham sebuah perusahaan, maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham (Mahendra, Artini, Suarjaya 2012).

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain;

- a. Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan.
- b. Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham.
- c. Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan.
- d. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
- e. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi.

2.1.4 Jumlah Dewan Komisaris

Struktur dewan dalam perusahaan di Indonesia menganut sistem *two tier*, yakni terdiri dari direksi sebagai pengelola dan komisaris sebagai pihak yang melakukan pengawasan (Wardhani 2008). Dewan komisaris berperan sebagai mekanisme internal yang mengontrol manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham atau pemilik. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan data perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen, dengan demikian, komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (direksi).

Dalam bank syariah, struktur *corporate governance* serupa dengan struktur *corporate governance* konvensional. *Corporate governance* dalam bank syariah dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh suatu dewan yang dinamakan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Rahman dan Bukair (2013) memfokuskan pada karakteristik DPS yang meliputi 4 atribut, yaitu :

1. Jumlah DPS
2. Rangkap jabatan DPS
3. Kualifikasi doktoral bidang ekonomi dan bisnis
4. Reputasi DPS.

Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI) mendefinisikan dewan komisaris sebagai inti *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. KNKG (2006) mendefinisikan Dewan Komisaris sebagai

mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Ukuran dewan komisaris adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan. Menurut Collier dan Gregory (1999) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan manajer dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen.

2.1.5 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Menurut Diantari dan Ulupui (2016) keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Wardhani 2008). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) pemilihan komisaris independen

harus memperhatikan pendapat pemegang saham yang dapat disalurkan melalui komite nominasi dan remunerasi.

Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur atau komisaris lainnya dalam perusahaan tercatat yang bersangkutan
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan
4. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
5. Komisaris independen diusulkan atau dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Misi komisaris independen adalah untuk mendorong iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) diantara berbagai kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris (Laksana 2010).

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak atau institusi diluar manajerial. Kepemilikan manajerial

umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Faizal 2004). Kepemilikan institutional diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah yang beredar. Keberadaan kepemilikan institusional dapat mengatasi masalah perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen karena mampu melakukan pengawasan terhadap segala tindakan manajemen agar dapat sesuai dan sejalan dengan tujuan suatu perusahaan.

Dalam teori keagenan perusahaan memisahkan antara fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan sehingga rentan terhadap konflik kepentingan, pihak agen yaitu manajer mempunyai kecenderungan melakukan perilaku *oportunistik* untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan hal ini sering menimbulkan konflik dengan pemegang saham sebagai *principal*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

2.1.7 Komite Audit

Pada saat ini pedoman *Good Corporate Governance* mensyaratkan setiap perusahaan atau emiten agar dapat terdaftar di pasar modal untuk memiliki komite audit. Sesuai dengan kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu

melaksanakan tugas dan fungsinya. Dewan komisaris dapat membentuk komite audit yang membantu dewan komisaris melakukan *monitoring* terhadap proses pelaporan keuangan. Selain pengawasan terhadap laporan keuangan, komite audit juga berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal perusahaan (Muryati dan Suardikha 2014).

Keanggotaan komite audit telah diatur oleh Bapepam dan Bursa Efek Indonesia, disebutkan bahwa komite audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari tiga orang, dimana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari komisaris independen dan dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Menurut Surjadi dan Tobing (2016), komite audit yang beranggota sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Namun, komite audit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota.

Perkembangan cakupan tugas komite audit menjadi semakin luas mencakup, pemantauan risiko (*oversight risk management*), sistem pengendalian manajemen, kepatuhan terhadap GCG. Peran dan tanggung jawab komite audit yang dituangkan dalam bentuk piagam komite audit harus memperoleh persetujuan dewan komisaris dan ditinjau ulang.

Menurut KNKG (2006) komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

- a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

- b. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
- c. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- d. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Perkembangan cakupan tugas komite audit menjadi semakin luas mencakup, pemantauan risiko (*oversight risk management*), sistem pengendalian manajemen, kepatuhan terhadap GCG. Peran dan tanggung jawab komite audit yang dituangkan dalam bentuk piagam komite audit harus memperoleh persetujuan dewan komisaris dan ditinjau ulang.

2.1.8 Tax Avoidance

Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *tax avoidance* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. *Tax avoidance* merupakan tindakan penghematan pajak yang masih dalam koridor perundang undangan (Ilmiani dan Sutrisno 2015). Perilaku penghindaran pajak tentunya bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang diperoleh perusahaan dengan cara menurunkan laba perusahaan, dengan kegiatan tersebut tentunya akan berdampak buruk terhadap nilai perusahaan di mata para investor (Anggoro 2015).

Menurut Adityamurti (2017), ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban merupakan pengurang dalam mendapatkan laba perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka

semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbeda dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* tidak melanggar perundang-undangan dan hanya memanfaatkan celah kelemahan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sedangkan *tax evasion* merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Suandy (2011) menjelaskan setidaknya-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisah dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Muryati dan Suardhika (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh

Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan menggunakan variabel dependen nilai perusahaan dan variable independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variable dependen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi berpengaruh terhadap variable independen (nilai perusahaan). Hanya variable komite audit yang tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Mahendra, Artini, Suarjaya (2012) meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan sampel pada perusahaan manufaktur di BEI dengan menggunakan variable dependen Nilai Perusahaan dengan pengukuran menggunakan Tobins'Q dan variabel independen rasio Likuiditas, rasio Leverage, dan rasio Profitabilitas dengan kebijakan dividen sebagai variable moderasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa rasio Likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa likuiditas tidak terlalu dipertimbangkan oleh pihak eksternal perusahaan dalam melakukan penilaian, Kebijakan dividen mampu secara signifikan memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan, Leverage berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, Kebijakan dividen mampu secara signifikan memoderasi pengaruh Leverage terhadap nilai perusahaan, Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dan kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.

Pertiwi dan Pratama (2012) meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan variable pemoderasi yaitu Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan yang berbidang Food and Beverage pada tahun 2005 – 2008. Variabel yang digunakan pada umumnya menggunakan kinerja keuangan dan nilai perusahaan dengan variable pemoderasi yaitu Good Corporate Governance. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Return on Asset merupakan salah satu factor yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan Good Corporate Governance tidak mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa variable Good Corporate Governance yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial bukanlah variable pemoderasi. Yang disebabkan struktur kepemilikan manajerial di Indonesia masih sangat kecil dan didominasi oleh keluarga.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL
1.	Ni Nyoman Tri Sariri Muryati dan I Made Sadha Suardikha (2014)	Pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada nilai perusahaan. 2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif pada nilai perusahaan. 3. Dewan komisaris independen berpengaruh positif pada nilai perusahaan. 4. Dewan direksi berpengaruh positif pada nilai perusahaan. 5. Komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
2.	Alfredo Mahendra,	Pengaruh Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

	Luh Gede Sri Artini, dan A.A Gede Suarjaya (2012)	Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 2. Leverage berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 3. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
3.	Tri Kartika Pertiwi dan Ferry Madi Ika Pratama. (2012)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Variabel Pemoderasi yaitu Good Corporate Governance.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 2. Interaksi antara kinerja keuangan dan Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan

Penelitian Angraini (2013) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Dewan komisaris berperan sebagai mekanisme internal yang mengontrol manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham atau pemilik. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan data perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen, dengan demikian, komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (direksi).

Dari perspektif teori keagenenan, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama dalam mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga membantu menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan manajer (Jensen dan Meckling 1976). Dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan berdampak pada kinerja perusahaan (KNKG 2006). Dengan adanya pengawasan yang baik terhadap kinerja perusahaan sehingga semakin baik pula penerapan GCG pada perusahaan, yang nantinya diharapkan memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan dimata investor.

H1: Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

2.3.2 Pengaruh Proporsi Dewan komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat (Diantari dan Ulupui 2016).

Dewan komisaris independen berfungsi mengawasi pengelolaan data perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen, dengan demikian komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (direksi). Semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka kemampuan dewan komisaris dalam pengambilan keputusan akan semakin objektif. Keputusan yang objektif akan mempengaruhi tingkat kepercayaan investor yang berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan.

Penelitian Muryati dan Suardikha (2014), Thaharah (2016), dan Wedyanthi dkk (2016) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan

H2: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

2.3.3 Pengaruh Kualifikasi Doktoral Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan

Pendidikan dapat bertindak sebagai aset institusional yang penting yang dapat mempengaruhi nilai dan praktik akuntansi (Gray, Owen, dan Maunders 1991). Bidang pendidikan yang ditempuh oleh komisaris akan berpengaruh pada pola pikir dan acuan bagi komisaris dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil kinerja perusahaan. Anggota dewan yang memiliki latar pendidikan ekonomi dan bisnis memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengambil keputusan bisnis. Meskipun bukan suatu keharusan bagi seseorang yang akan masuk dunia bisnis untuk

berpendidikan bisnis, tetapi akan lebih baik jika anggota dewan memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi.

Dengan memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi yang ada, setidaknya anggota dewan memiliki kemampuan lebih baik untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis daripada yang tidak memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi. Dalam penelitian Rahman dan Bukair (2013) menunjukkan bahwa kualifikasi doktoral berpengaruh positif terhadap perusahaan.

H3: Kualifikasi Doktoral Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

2.3.4 Pengaruh Reputasi Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan

Reputasi dalam anggota dewan komisaris dapat digunakan sebagai ukuran untuk pengetahuan bisnis. Reputasi yang dimaksud dalam dewan komisaris adalah apakah dewan tersebut pernah mendapatkan jabatan dalam bidang ekonomi di sektor pemerintahan atau belum (Rahman dan Bukair 2013). Seorang dewan komisaris yang pernah menjabat di sektor pemerintahan tentunya akan memiliki pengalaman yang lebih dibanding dengan dewan komisaris yang belum pernah menjabat di sektor pemerintahan.

Pada penelitian Rahman dan Bukair (2013) menunjukkan hasil bahwa reputasi dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Latar belakang komisaris yang pernah menjabat jabatan penting di pemerintahan tentunya akan memberikan keputusan yang lebih baik untuk kemajuan suatu perusahaan.

H4: Reputasi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki institusi dari total saham beredar. Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi yang pada akhirnya dapat menekan potensi kecurangan (Kusumaningtyas 2015). Kepemilikan institusional diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah yang beredar. Penelitian Muryati dan Suardikha (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Penerapan kepemilikan institusional sebagai salah satu proksi Good Corporate Governance diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan.

H5: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

2.3.6 Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Komite Audit merupakan komite yang berpandangan tentang masalah

akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Tugas pokok dari Komite Audit yaitu membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan review sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektifitas fungsi audit. Dengan begitu Komite Audit diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan dan membantu pelaksanaan GCG (Angraini 2013).

Komite audit dapat diukur dengan cara mencari tahu jumlah anggota audit yang ada di dalam perusahaan . Komite audit membantu dewan komisaris dalam pengawasan dalam menjalankan tugasnya dan akan mengurangi *agency problem*, semakin besar ukuran komite audit semakin efektif dalam pelaksanaan pengawasan, dan jika kinerja komite audit baik maka akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan.

H6: Komite Audit berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

2.3.7 Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan

Tax avoidance adalah usaha-usaha yang masih termasuk di dalam konteks peraturan-peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu memperbaiki *cashflow* perusahaan. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak terlarang meskipun seringkali mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun anggapan kurang nasionalis (Karimah dan Taufiq 2013).

Berdasarkan teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak untuk memenuhi kepentingannya, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan itulah yang memunculkan konflik keagenan. Perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam usaha memaksimalkan nilai perusahaan, kemungkinan manajemen akan berhadapan dengan munculnya konflik *agency problem* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, dimana masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingan pribadi saja (Ilmiani dan Sutrisno 2014).

Berdasarkan penelitian Karimah dan Taufiq (2013) dan penelitian luar [F Huseynov](#), S Sardarli, W Zhang (2017) menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian [F Huseynov](#), S Sardarli, W Zhang (2017) menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan ditandai timbulnya penurunan investasi ketika melakukan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Chasbiandani dan Martani (2012) menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu *tax avoidance* diduga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini sangat relevan jika *tax avoidance* digunakan sebagai variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.

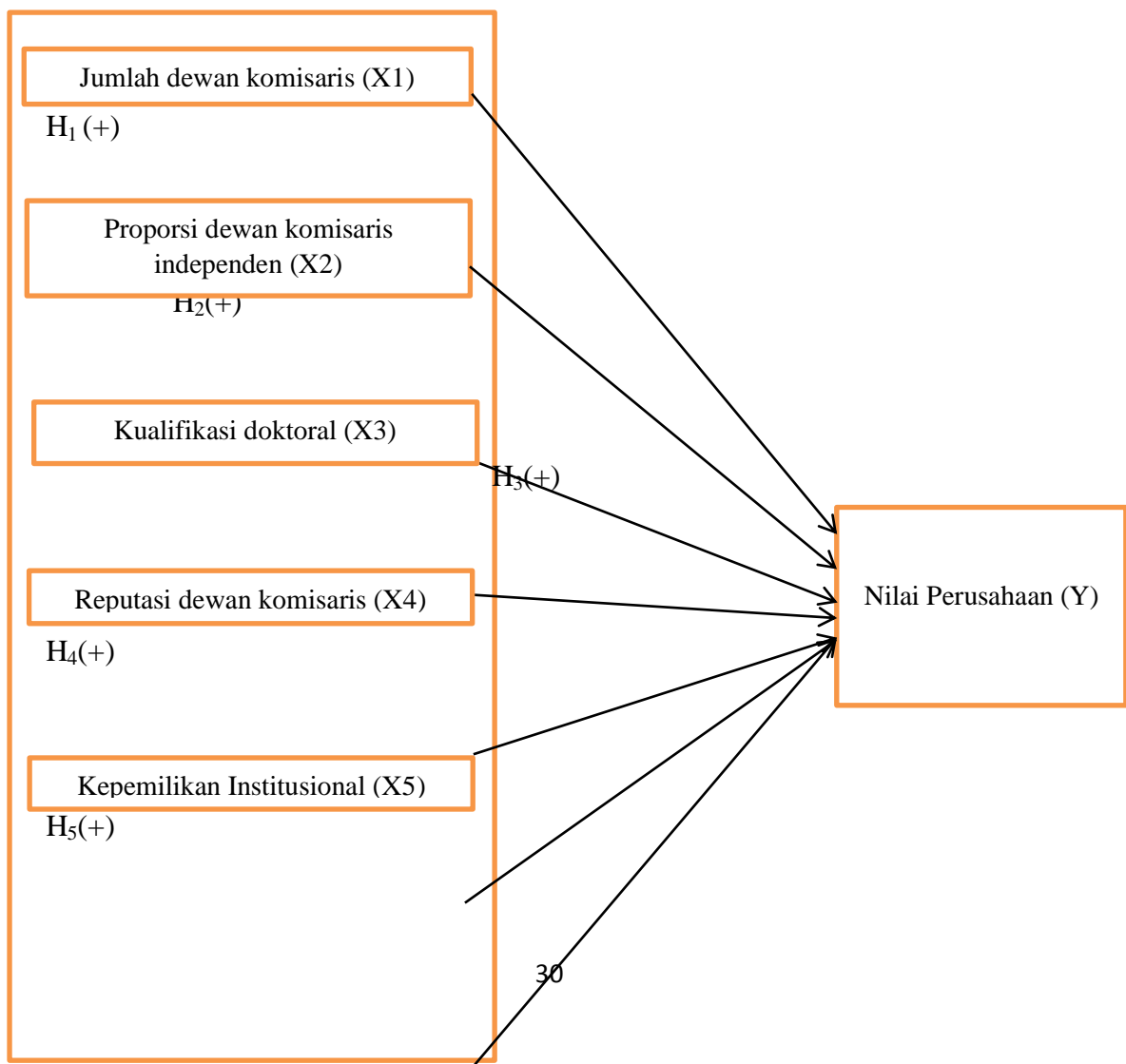
H7: *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4 Kerangka Penelitian

Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Wedyanthi dan Darmayanti 2016). Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan.

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



Komite Audit (X6)

H₆(+)

Tax Avoidance (X7)

H₇(+)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2016. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013 sampai 2016.
- 2) Perusahaan perbankan yang memiliki laba sebelum pajak yang bernilai positif pada periode tahun 2013 sampai 2016.
- 3) Perusahaan memiliki *Cash ETR* tahunan < 1 .
- 4) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember.

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu laporan keuangan pada perusahaan bank yang diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan melalui media perantara.

3.2 Variabel Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini memiliki variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini ada dua yaitu GCG (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kualifikasi doktoral, reputasi jabatan, kepemilikan institusional, dan komite audit yang diukur dengan proksi tunggal menggunakan *Price Book Value* dan *Tax Avoidance* yang diukur dengan CASH ETR (*cash effective tax rate*)

3.2.1 Nilai Perusahaan

Menurut Soliha dan Taswan (2002) dalam Kusumaningtyas (2015) nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan dapat memberi kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham perusahaan maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham dan untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Penelitian yang menggunakan pengukuran serupa adalah penelitian Kusumaningtyas (2015).

Price Book Value merupakan perbandingan harga pasar dengan nilai buku saham. Perusahaan yang berjalan baik umumnya mempunyai PBV diatas 1, yang

menunjukkan nilai pasar lebih tinggi dari nilai bukunya. PBV merupakan perbandingan harga saham dengan nilai buku saham.

$$\text{PBV} = \frac{\text{Harga per Lembar Saham}}{\text{Nilai Buku per Lembar}}$$

3.2.2 Jumlah Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah dewan yang berugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Perseroan Terbatas (Amanti 2015). Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan data perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen, dengan demikian komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen. Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris yang disebutkan dalam laporan keuangan perusahaan.

Jumlah Dewan Komisaris = jumlah anggota dewan komisaris perusahaan

3.2.3 Kualifikasi Doktoral

Kualifikasi doktoral merupakan gelar doktor yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris dalam perusahaan. Kualifikasi doktoral ini tentunya mempertimbangkan apakah dewan tersebut sudah memiliki gelar doktor dalam bidang ekonomi dan bisnis. Rahman dan Bukair (2013) menjelaskan bahwa pengukuran variabel dewan komisaris bisa juga menggunakan metode kualifikasi doktoral.

Ukuran Dewan Komisaris = kualifikasi doktoral dalam bidang ekonomi dan bisnis

3.2.4 Reputasi Dewan Komisaris

Rahman dan Bukair (2013) menjelaskan bahwa metode pengukuran dewan komisaris ada 4, yaitu menggunakan rasio jumlah dewan komisaris, rangkap jabatan dewan komisaris, kualifikasi doktoral bidang ekonomi dan bisnis, dan reputasi dewan komisaris. Namun data dalam penelitian ini mengambil dari bank konvensional yang dimana rangkap jabatan hanya bisa ditemukan datanya pada bank syariah. Sehingga untuk metode pengukuran pada variabel dewan komisaris ditambah menggunakan metode reputasi dewan komisaris.

Ukuran Dewan Komisaris = reputasi dewan komisaris

3.2.5 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi (Angraini 2013). Komisaris independen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terikat oleh perusahaan atau afiliasinya. Komisaris independen dapat digunakan untuk mengatas konflik keagenan karena komisaris independen dapat mengkomunikasikan tujuan para pemegang saham kepada para manajer. Dewan komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan persentase antara jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris.

$$\text{UDKI} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Komisaris}}$$

3.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak atau institusi diluar manajerial. Kepemilikan institusional

diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah saham yang beredar.

$$KI = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

3.2.7 Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang anggotanya merupakan anggota Dewan Komisaris yang terpilih yang memiliki tanggung jawab membantu menetapkan auditor independen terhadap usulan manajemen (Angraini 2013). Komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan komisaris memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi. Komite audit dalam penelitian ini adalah jumlah komite audit yang disebutkan dalam laporan keuangan.

Komite Audit = Jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan

3.2.8 Tax Avoidance

Perusahaan umumnya berusaha meningkatkan nilai perusahaan setiap periode karena tingginya nilai perusahaan, yang tercermin dalam harga saham, akan dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham (Ilmiani dan Sutrisno 2014). Hal ini memberi dampak para pemegang saham tetap mempertahankan investasinya dan calon investor tertarik menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. Berbagai upaya dilakukan pihak manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan, salah satunya adalah dengan melakukan pengurangan biaya pajak yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

Salah satu cara untuk mengefisienkan beban pajak adalah melalui penghindaran pajak (Ilmiani dan Sutrisno 2014).

Tax Avoidance dalam penelitian ini diukur dengan *CASH ETR* (*cash effective tax rate*) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Ilmiani dan Sutrisno 2014). Semakin besar *CASH ETR* mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Menurut Dyreng et.al. (2008) *CASH ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *CASH ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan, penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu, *CASH ETR* juga menggambarkan semua aktivitas penghindaran pajak yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Adapun rumus untuk menghitung *CASH ETR* adalah sebagai berikut:

$$\text{CASH ETR} = \frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

3.3 Alat Statistika

3.3.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak dimaksudkan menguji hipotesis. Analisis hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan.

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang digunakan dapat digunakan sebagai dasar estimasi yang tidak bias. Terutama untuk data yang banyak, perlu menggunakan uji asumsi klasik untuk lebih menyakinkan kesesuaian antara model persamaan regresi tersebut.

3.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk apakah data model regresi, dependen variabel dan independen variabel keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara mendeteksi normalitas suatu data dilakukan dengan analisis statistik yang salah satunya dapat dilihat melalui *Kolmogorof-Smirnov test* (K-S). Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- b. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 berarti data residual terdistribusi normal.

3.3.2.2 Uji Multikolienaritas

Multikolinearitas adalah situasi terdapat korelasi antara variabel bebas (independen) satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini multikolinieritas terindikasi

apabila terdapat hubungan linier antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat di lihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu *Variance Inflation Factor* (VIP). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai $VIP > 1$.

3.3.2.3 Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual yang satu dengan yang lain. Model regresi yang baik dan memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian adalah data yang tidak heterokedastisitas.

3.3.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan adanya kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pada periode $t-t$ (sebelumnya). Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan *time series*. Untuk mendiagnosis adanya auto korelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui uji *Runs*. Sebuah regresi dikatakan tidak terdapat masalah autokorelasi apabila nilai signifikansi $> 0,05$.

3.3.4 Analisis Linear Berganda

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda, untuk melihat pengaruh dewan komisaris (X1), dewan komisaris independen (X2), kepemilikan institusional (X3), komite audit (X4), dan *Tax*

Avoidance (X5) terhadap nilai perusahaan (Y). Pengujian masing masing hipotesis dilakukan dengan menguji masing-masing koefisien regresi dengan uji t. Model regresi liner berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = nilai Perusahaan

α = jumlah

X1 = dewan komisaris

X2 = dewan komisaris independen

X3 = kualifikasi doktoral

X4 = reputasi dewan komisaris

X5 = kepemilikan institusional

X6 = komite audit

X7 = *Tax Avoidance*

ε = error

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ dan β_7 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel terikat yang didasarkan pada variabel bebas. Arah hubungan dari koefisien regresi tersebut menandakan arah hubungan antara variabel bebas dengan terikat.

3.3.5 Uji Hipotesis

3.3.5.1 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentase variasi variabel bebas pada model dapat diterangkan oleh variabel terikat. Koefisien determinasi dinyatakan dalam persentase yang nilainya berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen kemampuannya sangat terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.3.5.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada uji ini, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t yang terdapat dalam t table:

1. Bila t hitung $>$ t tabel atau probabilitas $<$ tingkat signifikansi ($\text{sig} \leq 0,05$), maka H_a diterima dan H_o ditolak, variabel berpengaruh terhadap variabel dependen
2. Bila t hitung $<$ t tabel atau probabilitas $>$ tingkat signifikansi, maka H_a ditolak dan H_o diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

3.3.5.3 Uji Statistik F

Uji F untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit*. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka model regresi tidak *fit* (hipotesis ditolak).
2. Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka model regresi *fit* (hipotesis diterima).

Uji F juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada *output* hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, yang berarti bahwa model regresi *fit*.

3.3.6 Hipotesa Operasional

1. $H_{01}; \beta_1 \leq 0$: Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
 $H_{a1}; \beta_1 > 0$: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
2. $H_{02}; \beta_2 \leq 0$: Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
 $H_{a2}; \beta_2 > 0$: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
3. $H_{03}; \beta_3 \leq 0$: Kualifikasi doktoral dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

$H_{a3}; \beta_3 > 0$: Kualifikasi doktoral dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

4. $H_{04}; \beta_4 \leq 0$: Reputasi dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

$H_{a4}; \beta_4 > 0$: Reputasi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

5. $H_{05}; \beta_5 \leq 0$: Kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

$H_{a5}; \beta_5 > 0$: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

6. $H_{06}; \beta_6 \leq 0$: Komite audit tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

$H_{a6}; \beta_6 > 0$: Komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

7. $H_{07}; \beta_7 \leq 0$: *Tax Avoidance* tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

$H_{a7}; \beta_7 > 0$: *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan melakukan analisis data dan hasil penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan menganalisa data yang telah dikumpulkan tersebut sesuai dengan pokok permasalahannya dan formulasi hipotesis yang telah dikemukakan dalam bab 2 untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Bagian ini juga berisi tentang karakteristik data penelitian, hasil dari pengolahan data berupa statistik, tabel dan hasil analisis yang terdapat di dalam lampiran.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Tabel 4.1.1
Sampel Penelitian

No	Keterangan	mlah
----	------------	------

populasi:	42
perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013 sampai 2016	
perusahaan yang memiliki nilai laba negatif.	(11)
perusahaan dengan nilai CASH ETR lebih dari 1, yang artinya terindikasi tidak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak dengan baik.	(6)
Jumlah perusahaan yang masuk kriteria.	25
Data selama 4 tahun (25x4)	100
Total Data	100

Sumber : Hasil penelitian, 2017

Jumlah perusahaan sektor perbankan pada penelitian ini yaitu sebanyak 25 perusahaan (2013-2016) dengan total sampel 100 data.

4.1.2 Analisis Deskriptif

Tabel 4.1.2
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBV	100	,15	4,23	1,2760	,80958
UDK	100	3,00	8,00	5,3100	1,80736
PDKI	100	,25	,80	,5501	,11804
KI	100	,17	,99	,7511	,20364
KDD	100	,00	1,00	,2400	,42923
RDD	100	,00	1,00	,2400	,42923
KA	100	3,00	7,00	4,0200	1,13689
TA	100	,01	1,77	,2617	,22691
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah observasi data adalah 100.

Variabel nilai perusahaan yang diprosikan dengan *price to book value* (PBV)

mempunyai nilai terendah 0,15 yang dimiliki oleh BNII pada tahun 2013, sedangkan nilai tertinggi 4,23 dimiliki oleh BEKS pada tahun 2016. Selama periode 2013-2016, rata-rata nilai perusahaan pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia menunjukkan 1,2760, maka lebih dari satu. Artinya perusahaan memiliki peluang investasi yang lebih baik dan menunjukkan manajemen aset yang telah dilakukan dengan baik.

Deskripsi variabel Ukuran Dewan Komisaris (UDK) dari 100 perusahaan mempunyai nilai terendah sebesar 3 yang dimiliki oleh BACA pada tahun 2013, sedangkan nilai tertinggi sebesar 8 dimiliki oleh BNLN dan BBNI selama 2013-2016, rata-rata pada Ukuran Dewan Komisaris adalah 5,1875

Deskripsi variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) dari 100 perusahaan mempunyai nilai terendah sebesar 0,25 yang dimiliki oleh BVIC pada tahun 2016, sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh BABP pada tahun 2013 sebesar 8 selama 2013-2016, rata-rata pada proporsi Dewan Komisaris adalah 0,5501.

Deskripsi variabel Kualifikasi Doktoral Dewan (KDD) dari 100 perusahaan mempunyai nilai terendah sebesar 0 atau tidak mempunyai anggota dewan yang doktor di bidang ekonomi, sedangkan nilai tertinggi 1 atau mempunyai anggota dewan yang doktor di bidang ekonomi. Tingkat rata-rata pada kualifikasi doctoral Dewan adalah 0,24 atau 24 % perusahaan mempunyai kualifikasi doktoral di bidang ekonomi.

Deskripsi variabel Reputasi Dewan Komisaris (RDK) dari 100 perusahaan mempunyai nilai terendah sebesar 0 atau tidak pernah mempunyai

jabatan strategis di pemerintahan bidang, sedangkan nilai tertinggi 1 atau pernah mempunyai jabatan strategis di pemerintahan bidang. Tingkat rata-rata pada reputasi Dewan komisaris adalah 0,24 atau 24% perusahaan mempunyai komisaris yang pernah menjabat strategis di pemerintahan bidang.

Deskripsi variabel Kepemilikan Institusional (KI) dari 100 perusahaan mempunyai nilai terendah sebesar 0,17 yang dimiliki oleh MCOR pada tahun 2015, sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh BNGA sebesar 0,99, rata-rata pada kepemilikan institusional adalah 0,7511.

Deskripsi variabel Komite Audit (KA) dari 96 perusahaan mempunyai nilai terendah sebesar 3 dimiliki oleh AGRO, BABP, BACA, BBNI, BBNP, BEKS, BNBA, BSWD, BVIC, MAYA, MCOR, SDRA, BNLI, PNBN, NISP, dan BTPN, sedangkan nilai tertinggi sebesar 7 dimiliki oleh BBTN, rata-rata pada Komite Audit adalah 4,02.

Deskripsi variabel *Tax Avoidance* (TA) dari 100 perusahaan mempunyai nilai terendah sebesar 0,01 yang dimiliki oleh MCOR pada tahun 2013 dan AGRO pada tahun 2016, sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh BNGA pada tahun 2015 sebesar 1,77 rata-rata pada *tax avoidance* adalah 0,2617.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk apakah data dalam model regresi, dependen variabel dan independen variabel keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara mendeteksi normalitas suatu data dilakukan dengan analisis statistik

yang salah satunya dapat dilihat melalui *Kolmogorof-Smirnov test* (K-S). Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- b. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 berarti data residual terdistribusi normal.

Tabel 4.1.3.1

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,78353828
	Absolute	,168
Most Extreme Differences	Positive	,168
	Negative	-,090
Kolmogorov-Smirnov Z		1,675
Asymp. Sig. (2-tailed)		,007

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

4.1.3.2 Uji Normalitas Setelah Outlier

Berdasarkan hasil uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel di atas nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,07 lebih kecil dari 0,05 berarti data residual tidak terdistribusi normal. Untuk menormalkan data maka perlu dilakukan dilakukan pembersihan data dari outlier.

Tabel 4.1.3.2

Uji Normalitas Setelah Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,52239374
	Absolute	,121
Most Extreme Differences	Positive	,121
	Negative	-,072
Kolmogorov-Smirnov Z		1,175
Asymp. Sig. (2-tailed)		,126

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji statistin non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel diatas nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,126 lebih besar dari 0,126 berarti data residual terdistribusi normal.

4.1.3.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Gejala multikolonieritas dapat diketahui dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (FIV). Hasil uji Multikolinieritas bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1.3.3

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
UDK	,537	1,861

PDKI	,840	1,190
KDD	,202	4,952
RDD	,181	5,519
KI	,698	1,432
KA	,632	1,583
TA	,812	1,232

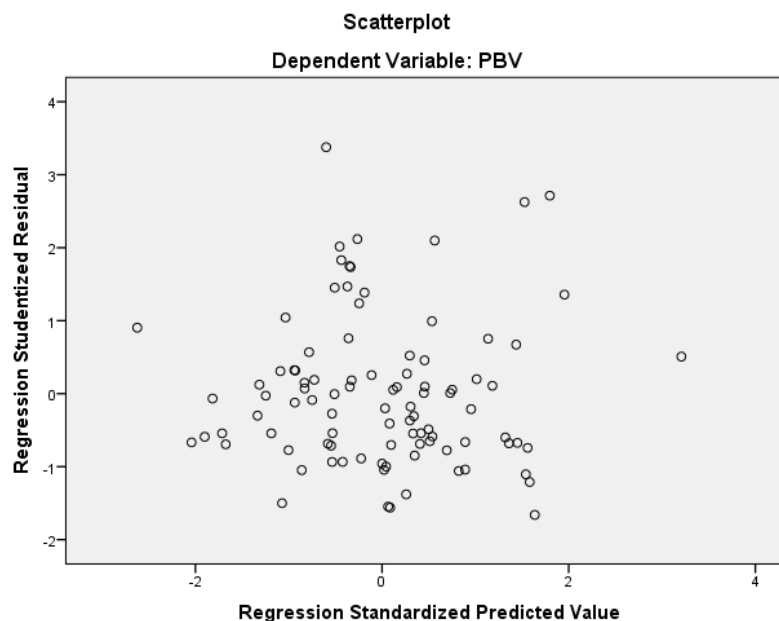
Hasil pengujian pada tabel menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas diantara variabel independen.

4.1.3.4 Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual yang satu dengan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas, karena jika terdapat heterokedastisitas dapat menyebabkan varians tidak konstan sehingga menimbulkan standar error. Cara menentukan heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Tabel 4.1.3.4

Hasil Uji Heterokedestisitas



Dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan scatterplot diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka nol (0) pada sumbu Y dan tidak membentuk sebuah pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak mengandung heterokedastisitas.

4.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar residual satu observasi dengan observasi lain. Ada tidaknya penyimpangan autokorelasi dalam penelitian ini dapat diketahui dengan melakukan pengujian analisis *run test*. Pengujian run test dilakukan untuk data bertingkat dari nilai variabel yang acak.

Tabel 4.1.4
Hasil Uji *Runs-Test*

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,06269
Cases < Test Value	47
Cases >= Test Value	48
Total Cases	95
Number of Runs	46
Z	-,515
Asymp. Sig. (2-tailed)	,607

a. Median

Pada hasil output SPSS untuk uji runs test menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,607 (lebih besar dari 0,05) yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

4.1.5 Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.1.5
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,465	,468		,994	,323
UDK	-,078	,042	-,238	-1,849	,068
PDKI	1,116	,524	,219	2,129	,036
KDD	,766	,285	,563	2,684	,009
RDD	-,337	,301	-,247	-1,118	,267
KI	,866	,323	,302	2,677	,009
KA	-,048	,061	-,093	-,782	,436
TA	-,311	,289	-,112	-1,076	,285

a. Dependent Variable: PBV

Berdasarkan tabel diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,465 - 0,078(\text{UDK}) + 1,116(\text{PDKI}) + 0,766(\text{KDD}) - 0,337(\text{RDD}) + 0,866(\text{KI}) - 0,048(\text{KA}) - 0,311(\text{TA})$$

1. Hasil persamaan regresi konstanta sebesar 0,465 artinya apabila ukuran dewan komisaris, proporsi dewan independen, kualifikasi doktoral, reputasi dewan komisaris kepemilikan institusional, komite audit dan *Tax Avoidance* dianggap konstan (bernilai 0), maka tingkat nilai perusahaan (PBV) akan sebesar 0,465.
2. Koefisien variabel Ukuran Dewan Komisaris sebesar -0,078, artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel ukuran dewan komisaris mengalami kenaikan 1%, maka variabel tingkat PBV akan mengalami peningkatan sebesar -0,078. Nilai signifikansi sebesar 0,068 > 0,05 menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
3. Koefisien variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen sebesar 1,116, artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel proporsi dewan komisaris independen mengalami kenaikan 1%, maka variabel tingkat PBV akan mengalami peningkatan sebesar 1,116. Nilai signifikansi sebesar 0,036 < 0,05 menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
4. Koefisien variabel kualifikasi doktoral sebesar 0,766, artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel kualifikasi doktoral mengalami

kenaikan 1%, maka variabel tingkat PBV akan mengalami peningkatan sebesar 0,766. Nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ menyatakan bahwa kualifikasi doktoral berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

5. Koefisien variabel reputasi dewan komisaris sebesar -0,377, artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel reputasi dewan komisaris mengalami kenaikan 1%, maka variabel tingkat PBV akan mengalami penurunan sebesar -0,377. Nilai signifikansi sebesar $0,267 > 0,05$ menyatakan bahwa reputasi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
6. Koefisien variabel Kepemilikan Institusional (X3) sebesar 0,866 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel kepemilikan institusional mengalami kenaikan 1%, maka variabel tingkat PBV akan mengalami peningkatan sebesar 0,866. Nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
7. Koefisien variabel Komite Audit sebesar -0,048, artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel komite audit mengalami kenaikan 1%, maka variabel tingkat PBV akan mengalami peningkatan sebesar -0,048. Nilai signifikansi sebesar $0,436 > 0,05$ menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
8. Koefisien variabel *Tax Avoidance* sebesar -0,311, artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel *Tax Avoidance* mengalami kenaikan 1%, maka variabel tingkat PBV akan mengalami penurunan sebesar -

0,311. Nilai signifikansi sebesar $0,285 > 0,05$ menyatakan bahwa *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

4.1.6 Uji Hipotesis

4.1.6.1 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.1.6.1
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,478 ^a	,228	,166	,54300	2,007

a. Predictors: (Constant), TA, KDD, PDKI, KA, KI, UDK, RDD

b. Dependent Variable: PBV

Dari Tabel diatas menunjukkan adjusted R^2 adalah 0,166 hal ini menyatakan bahwa 16,6% variasi nilai perusahaan (PBV) dapat dijelaskan oleh

variasi ke tujuh variabel independen ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kualifikasi doktoral, reputasi dewan, kepemilikan institusional, komire audit, dan *Tax Avoidance*. Sedangkan 83,4% dijelaskan oleh variabel lainya yang tidak menjadi objek penelitian ini, hal ini dapat diterima karena variabel nilai perusahaan (PBV) juga banyak dipengaruhi variabel-variabel lain.

4.1.6.2 Uji Pengaruh Parsial (t-test)

Tabel 4.1.6.2
Hasil Uji t-test

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,465	,468		,994	,323
UDK	-,078	,042	-,238	-1,849	,068
PDKI	1,116	,524	,219	2,129	,036
1 KDD	,766	,285	,563	2,684	,009
RDD	-,337	,301	-,247	-1,118	,267
KI	,866	,323	,302	2,677	,009
KA	-,048	,061	-,093	-,782	,436

TA	-,311	,289	-,112	-1,076	,285
----	-------	------	-------	--------	------

a. Dependent Variable: PBV

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara linier antara variabel bebas dan variabel terikat. Berikut hasil uji t:

1. Hasil pengujian menunjukkan signifikansi ukuran dewan komisaris yaitu sebesar $0,068 > 0,05$ maka H_0 diterima, dengan kata lain hipotesis tidak terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
2. Hasil pengujian menunjukkan signifikansi proporsi dewan komisaris independen yaitu sebesar $0,036 < 0,05$ maka H_0 ditolak dengan kata lain hipotesis terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
3. Hasil pengujian menunjukkan signifikansi kualifikasi doktoral komisaris yaitu sebesar $0,009 < 0,05$ maka H_0 ditolak dengan kata lain hipotesis terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualifikasi doktoral komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
4. Hasil pengujian menunjukkan signifikansi reputasi dewan komisaris yaitu sebesar $0,267 > 0,05$ maka H_0 diterima dengan kata lain hipotesis terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reputasi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
5. Hasil pengujian menunjukkan signifikansi kepemilikan institusional yaitu sebesar $0,009 < 0,05$ maka H_0 ditolak, dengan kata lain hipotesis terbukti.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

6. Hasil pengujian menunjukkan signifikansi komite audit yaitu sebesar $0,436 > 0,05$, maka H_0 diterima, dengan kata lain hipotesis tidak terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
7. Hasil pengujian menunjukkan signifikansi *Tax Avoidance* yaitu sebesar $0,285 > 0,05$ maka H_0 diterima, dengan kata lain hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

4.1.6.3 Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji signifikansi simultan (uji F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terkait. Jika probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil uji F adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.6.3

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

	Regression	7,579	7	1,083	3,672	,002 ^b
1	Residual	25,652	87	,295		
	Total	33,231	94			

a. Dependent Variable: PBV

b. Predictors: (Constant), TA, KDD, PDKI, KA, KI, UDK, RDD

Berdasarkan hasil uji F diatas, dihasilkan F hitung sebesar 3,672 dengan nilai signifikansi 0,002 yang dimana nilai signifikansi yang dihasilkan $<0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan telah layak untuk pengujian hipotesis.

4.2 Pembahasan Hipotesis

4.2.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Pertama

Hasil pengujian pengaruh ukuran dewan komisaris diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,068 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 atau 5 % ($\alpha = 0,05$). Maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Pembentukan dewan komisaris tidak mempertimbangkan efektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Efektivitas dewan tidak berdasarkan besar kecilnya jumlah dewan komisaris namun mengenai kemampuan dan integritas. Ketika dalam pembentukan tidak memperhatikan kemampuan dan integritas, sehingga dewan komiaris belum mampu memberikan arahan kepada manajemen dengan baik untuk mencapai transparansi dan meningkatkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, Investor tidak melihat ukuran dewan komisaris sebagai tolak ukur untuk menanamkan modalnya ke perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Amanti (2015) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun penelitian Angraini (2013) tidak mendukung penelitian ini karena menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Kedua

Hasil pengujian pengaruh proporsi dewan komisaris independen diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,036 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 atau 5 % ($\alpha = 0,05$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Membuktikan bahwa proporsi dewan komisaris independen menjalankan fungsi *monitoring* dalam mengawasi kebijakan serta kegiatan yang dilakukan direksi. Sehingga dapat memberikan kontribusi efektif dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Proporsi dewan komisaris independen yang semakin tinggi menandakan bahwa dewan komisaris independen melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi perusahaan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan. Maka penerapan *Good Corporate Governance* akan terlaksana dengan baik sehingga mampu menaikkan nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian Muryati dan Suardikha (2014), Thaharah (2016), serta Wedyanthi dan Darmayanti (2016) yang dimana menunjukkan hasil penelitian bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menolak penelitian dari Kusumaningtyas (2015) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

4.2.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Hasil pengujian pengaruh kualifikasi doktoral dewan komisaris diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 atau 5 % ($\alpha = 0,05$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa kualifikasi doktoral dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Jumlah dan jenis pendidikan berisi informasi yang kaya dan kompleks tentang individu. Bidang pendidikan yang ditempuh oleh komisaris, yaitu pada bidang apa komisaris menyelesaikan pendidikannya. Hal ini akan berpengaruh pada pola pikir dan acuan bagi komisaris dalam menentukan kebijakan yang akan diambil. Dimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil kinerja perusahaan. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan berpengaruh terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Anggota dewan yang memiliki latar pendidikan ekonomi dan bisnis memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengambil keputusan bisnis. Meskipun bukan suatu keharusan bagi

seseorang yang akan masuk dunia bisnis untuk berpendidikan bisnis, tetapi akan lebih baik jika anggota dewan memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi. Dengan memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi yang ada, setidaknya anggota dewan memiliki kemampuan lebih baik untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis daripada yang tidak memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi.

4.2.4 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Keempat

Hasil pengujian pengaruh reputasi dewan komisaris diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,267 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 atau 5 % ($\alpha = 0,05$). Maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga hipotesis keempat dapat disimpulkan bahwa reputasi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hal ini berarti latar belakang komisaris yang pernah menjabat jabatan penting di pemerintahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil penelitian ini fungsi pengawasan, efektivitas mekanisme pengawasan dewan komisaris tidak tergantung pada besar latar belakang dewan komisaris. Selain hal tersebut, pemegang saham mayoritas (pengendali/*founders*) masih memegang peranan penting sehingga menjadikan dewan komisaris tidak independen dan fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab anggota dewan menjadi tidak efektif sehingga tidak akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

4.2.5 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Kelima

Hasil pengujian pengaruh kepemilikan institusional diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 atau 5 % ($\alpha = 0,05$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hipotesis kelima dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki institusi dari total saham beredar. Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi yang pada akhirnya dapat menekan potensi kecurangan (Kusumaningtyas 2015). Kepemilikan institusional diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah yang beredar. Penelitian Muryati dan Suardikha (2014) serta Wida dan Suartana (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Penerapan kepemilikan institusional sebagai salah satu proksi Good Corporate Governance diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian oleh Muryati dan Suardikha (2014) serta Wida dan Suartana (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

4.2.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Keenam

Hasil pengujian pengaruh komite audit diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,436 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 atau 5 % ($\alpha = 0,05$). Maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga hipotesis keenam dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Dewan komisaris membentuk komite audit yang membantu dewan komisaris dalam melakukan *monitoring* terhadap proses pelaporan keuangan dan melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan komite audit justru akan menurunkan nilai perusahaan. Adanya pengaruh negatif ini dikarenakan jumlah anggota komite audit yang semakin banyak kurang baik terhadap kinerja perusahaan karena akan ada pekerjaan yang terpecah sehingga performa perusahaan tidak optimal dan tidak efektif dan efisiennya pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan, apabila dengan banyaknya anggota komite audit berdampak pada banyaknya perbedaan pemikiran sehingga menimbulkan perdebatan yang berarti. Sehingga jumlah komite audit yang banyak belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan tidak menjamin kinerja perusahaan akan semakin baik, tapi yang diperlukan perusahaan adalah komite audit yang memiliki kompetensi dan integritas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wedayanthi dan Darmayanti (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh secara negatif terhadap nilai perusahaan..

4.2.5 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Ketujuh

Hasil pengujian pengaruh *Tax Avoidance* diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,285 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 atau 5 % ($\alpha = 0,05$). Maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga hipotesis ketujuh dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang terjadi di dalam perusahaan bukanlah sebuah kegiatan yang dilarang karena prosedur penghindaran pajak tidak melanggar hukum atau undang-undang. Apabila perusahaan dapat meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan karena beban merupakan pengurang dalam mendapatkan laba perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil penelitian ini berbeda penelitian yang dilakukan oleh Anggoro (2015) yang menunjukkan perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah positif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2016. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

2. Hasil peneltian ini membuktikan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
3. Hasil peneltian ini membuktikan bahwa kualifikasi doktoral dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
4. Hasil peneltian ini membuktikan bahwa reputasi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
5. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
6. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.
7. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *Tax Avoidance* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan penelitian ini untuk melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi meningkat atau menurunnya suatu nilai perusahaan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumber referensi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Seperti pada hasil dari penelitian ini, apabila perusahaan ingin meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* pada suatu perusahaan maka akan semakin

memperkecil celah untuk melakukan penghindaran pajak dan apabila perusahaan ingin meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* pada suatu perusahaan maka akan semakin menaikkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan penghindaran pajak pada suatu perusahaan maka akan semakin menurunkan nilai.

2. Bagi Investor

Dari hasil penelitian ini diharapkan investor dapat memperhatikan dan mempertimbangkan pemilihan perusahaan dalam berinvestasi dengan melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi turunnya nilai perusahaan, seperti penerapan *Good Corporate Governanve* yang baik oleh perusahaan diharapkan akan menghasilkan return untuk para investor. Investor pun berharap agar dapat lebih menaruh kepercayaan kepada perusahaan *go public*.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain :

1. Pengukuran variabel nilai perusahaan masih menggunakan satu pengukuran yaitu *Price Book Value* sehingga belum mencerminkan tingkat nilai perusahaan yang sebenarnya.
2. Sumber untuk mencari laporan keuangan dan data keuangan perusahaan dalam penelitian ini sangat terbatas.

3. Periode penelitian hanya 4 tahun dari tahun 2013-2016 dan hanya perusahaan sektor perbankan saja.

5.4 Saran

Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pengukuran lain untuk variabel nilai perusahaan seperti Tobin's Q atau *return* saham.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain sebagai mekanisme *Good Corporate Governance* seperti ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode penelitian dan menggunakan industri jenis yang lain seperti manufaktur, infrastruktur, pertambangan sehingga bisa membedakan tingkat nilai perusahaan pada setiap jenis industri tersebut.
4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan metode pengukuran pada variabel komite audit yaitu jumlah *meeting* dan hasil dari *meeting* tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Adityamurti, Enggar. 2017. "Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan." Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Amanti, Lutfilah. 2015. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi." *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya* 5 (1): 57-68.
- Anggoro, Stevanus Tri. 2015. "Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating." Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Angraini, Dina. 2013. "Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Textile, Garment yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009-2012." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 17(2): 98-112.
- Brigham, Eugene F., dan Houston. 2006. "Fundamental of Financial Management: Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Edisi 10." Jakarta: Salemba Empat.
- Chasbiandani, Tryas., dan Dwi Martani. 2012. "Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan." Pasca Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.

- Christiawan, Yulius Jogi., dan Josua Tarigan. 2007. “Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1: 1-8.
- Collier, Paul., dan Alan Gregory. 1999, “Audit Committee Activity and Agency Costs”, *Journal of Accounting and Public Policy* 18: 311–332.
- Diantari, Putu Rista., dan IGK Agung Ululupi. 2016. “Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance.” *E-journal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16.1 Juli 2016: 702-732. ISSN: 2302-8556.
- Dyreg, Scott D., Michelle Hanlon., dan Edward L. Maydew. 2008. “Long-Run Corporate Tax avoidance.” *The Accounting Review* Vol 83 No. 1
- Faizal. 2004. “Analisis Agency Costs, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance.” *Symposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar Bali, Hal 197-207*.
- FCGI. 2001. Seri Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), Edisi ke-2 Jakarta.
- Gray, R., D. Owen, D.L., & Maunders, K.T. (1991). Accountability, Corporate Social Reporting and External Social Audits. *Advances in Public Interest Accounting*, 4, 1-23.
- Ilmiani, Amalia., dan Catur Ragil Sutrisno. 2014. “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14(1).
- Jensen, Michael C., dan William H Meckling. 1976. “The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure.” *Journal of Financial and Economics* 3:305-360.
- Kaihatu, Thomas S. 2006. “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia.” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 8 No. 1, Maret 2006: 1-9.
- Kaluti, Stephani Novitasari Christianingsih., dan Agus Purwanto. 2014. “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Keuangan terhadap Nilai Perusahaan”. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 3, No. 2: 1-12.
- Karimah, Hana Nadia., dan Eindye Taufiq. 2013. “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan” *Ekombis Review* 72–86.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta.
- Kusumaningtyas, Titah Kinanti. 2015. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Sri-Kehati.” *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4(7).
- Laksana, Banter. 2010. “Dampak Loan to Deposit Ratio dan Return On Asset terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan jasa Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).” *Jurnal Manajemen dan Bisnis*

2(1): 35–46.

- Mahendra, Alfredo., Luh Gede Sri Artini, dan A.A Gede Suarjaya. 2012. “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan* Vol. 6, No. 2 Agustus 2012.
- Muryati, Ni Nyoman Tri Sariri., dan I Made Sadha Suardikha. 2014. “Pengaruh Corporate Governance Pada Nilai Perusahaan.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 9, No. 2, November.
- Pertiwi, Tri Kartika., dan Ferry Madi Ika Pratama. 2012. “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Variabel Pemoderasi yaitu Good Corporate Governance.” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 14 No.2: 118-127, September 2012.
- Rahman, A. A., dan Bukair, A. A. (2013). “The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries.” *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), 65-104.
- Soliha, E., dan Taswan. 2002. “Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan serta Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya.” *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 9(2). September: 149-163.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surjadi, Christy., dan Rudolf L. Tobing, 2016. “Efek Moderasi Ukuran Perusahaan Pada Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 11(2):72.
- Thaharah, Nina. 2016. “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Lq 45.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 5 No. 2.
- Warapsari, A A Ayu Uccahati., dan I G N Agung Suaryana. 2016. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Institusional terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Utang sebagai Variabel Intervening.” *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 16(3), 2288–2315.
- Wardhani, Ratna. 2008. “Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia dan Hubungannya dengan Karakteristik Dewan sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance.” *Symposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak: 23-24 Juli*.
- Wedyanthi, Krisna Komang., dan Ni Putu Ayu Darmayanti. 2016. “Pengaruh *Economic Value Added*, Komposisi Dewan Komisaris Independen dan *Return on Assets* Terhadap Nilai Perusahaan.” *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 6, 2016: 3647-3676
- Wida, Ni Putu, dan I Wayan Suartana. 2014. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Nilai Perusahaan.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 3(9.3): 575–590.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read131043/penurunan-nilai-aset-kredit-membengkak-bank-permata-rugi-rp648-triliun.html>
www.idx.co.id

LAMPIRAN 1

Daftar Sampel Perusahaan Sektor Perbankan

No	Kode	Perusahaan
1	AGRO	PT. Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk
2	BABP	PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk
3	BACA	PT. Bank Capital Indonesia, Tbk
4	BBKP	PT. Bank Bukopin, Tbk
5	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
6	BBNP	PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk
7	BBTN	PT. Bank Tabungan Negara, Tbk
8	BDMN	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
9	BEKS	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk
10	BJBR	PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk

11	BMRI	PT. Bank Mandiri, Tbk
12	BNBA	PT. Bank Bumi Arta, Tbk
13	BNGA	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
14	BNII	PT Maybank, Tbk
15	BNLI	PT. Bank Permata, Tbk
16	BSIM	PT Bank Sinarmas, Tbk
17	BSWD	PT Bank of India Indonesia, Tbk
18	BTPN	PT. Bank BTPN, Tbk
19	BVIC	PT. Bank Victoria Internasional, Tbk
20	INPC	PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk
21	MAYA	PT. Mayapada, Tbk
22	MCOR	PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk
23	NISP	PT. OCBC NISP, Tbk
24	PNBN	PT. Bank Panin, Tbk
25	SDRA	PT Woori Saudara

LAMPIRAN 2

Dewan komisaris, Proporsi Dewan Komisaris, Kualifikasi Doktoral, Reputasi Dewan dan Komite Audit

Tahun	Kode	Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris Independen	Proporsi Dewan Komisaris Independen	Komite Audit	Kualifikasi Doktoral	Reputasi Dewan Komisaris
2013	AGRO	5	3	0,60	3	0	0
2013	BACA	3	2	0,67	3	0	0
2013	BBKP	6	4	0,67	4	0	0
2013	BBNI	8	4	0,50	3	1	1
2013	BBNP	4	2	0,50	3	0	0
2013	BBTN	6	3	0,50	5	1	1
2013	BDMN	8	4	0,50	7	1	1
2013	BEKS	4	3	0,75	3	0	0
2013	BJBR	5	4	0,80	6	0	0
2013	BMRI	7	3	0,43	6	1	1
2013	BNBA	3	1	0,33	3	0	0
2013	BNGA	8	4	0,50	6	0	0
2013	BNII	6	3	0,50	4	0	1
2013	BNLI	8	4	0,50	4	0	0
2013	BSIM	3	2	0,67	4	0	0
2013	BSWD	3	1	0,33	3	0	0
2013	BTPN	6	3	0,67	5	0	1
2013	BVIC	5	3	0,60	3	0	0
2013	INPC	6	4	0,67	6	0	0
2013	MAYA	5	3	0,60	3	0	0
2013	MCOR	3	2	0,67	3	0	0
2013	MEGA	4	2	0,50	3	1	0
2013	NISP	8	4	0,50	4	0	0
2013	PBNB	4	2	0,50	4	0	0
2013	SDRA	3	2	0,67	3	0	0
2014	AGRO	5	3	0,60	3	0	0
2014	BACA	3	2	0,67	3	0	0
2014	BBKP	6	4	0,67	4	0	0
2014	BBNI	8	4	0,50	3	1	1
2014	BBNP	4	2	0,50	3	0	0
2014	BBTN	6	3	0,50	4	1	1
2014	BDMN	6	3	0,50	6	1	1
2014	BEKS	4	2	0,50	3	0	0
2014	BJBR	7	4	0,57	6	0	0
2014	BMRI	7	4	0,71	6	1	1

2014	BNBA	3	1	0,33	3	0	0
2014	BNGA	8	4	0,50	6	0	0
2014	BNII	6	3	0,50	4	1	1
2014	BNLI	8	4	0,50	3	0	0
2014	BSIM	3	2	0,67	4	0	0
2014	BSWD	3	1	0,33	5	0	0
2014	BTPN	6	3	0,50	4	1	1
2014	BVIC	4	3	0,75	4	0	0
2014	INPC	6	3	0,50	6	0	0
2014	MAYA	5	3	0,60	3	1	0
2014	MCOR	3	2	0,67	4	0	0
2014	MEGA	4	2	0,50	3	0	0
2014	NISP	8	4	0,50	4	0	0
2014	PNBN	4	2	0,50	4	0	0
2014	SDRA	4	3	0,75	3	0	0
2015	AGRO	4	2	0,50	3	0	0
2015	BACA	3	2	0,67	3	0	0
2015	BBKP	6	3	0,50	5	0	0
2015	BBNI	8	5	0,63	4	1	1
2015	BBNP	4	2	0,50	3	0	0
2015	BBTN	7	4	0,57	5	1	1
2015	BDMN	7	4	0,57	5	1	1
2015	BEKS	4	2	0,50	3	0	0
2015	BJBR	4	3	0,75	5	0	0
2015	BMRI	8	4	0,50	5	1	1
2015	BNBA	3	1	0,33	3	0	0
2015	BNGA	8	4	0,50	6	0	0
2015	BNII	6	3	0,50	4	1	1
2015	BNLI	8	4	0,50	4	0	0
2015	BSIM	3	2	0,67	3	0	0
2015	BSWD	3	1	0,33	3	0	0
2015	BTPN	6	3	0,50	3	1	1
2015	BVIC	4	3	0,75	5	0	0
2015	INPC	6	3	0,50	6	0	0
2015	MAYA	5	2	0,40	3	0	0
2015	MCOR	3	2	0,67	4	0	0
2015	MEGA	4	2	0,50	3	0	0
2015	NISP	8	4	0,50	3	0	0
2015	PNBN	6	4	0,67	4	0	0
2015	SDRA	4	3	0,75	5	0	0
2016	AGRO	4	2	0,75	3	0	0

2016	BACA	3	2	0,67	3	0	0
2016	BBKP	7	4	0,57	5	0	0
2016	BBNI	8	5	0,63	4	1	1
2016	BBNP	4	2	0,50	3	0	0
2016	BBTN	7	4	0,57	7	1	1
2016	BDMN	7	4	0,57	5	1	1
2016	BEKS	5	2	0,40	4	0	0
2016	BJBR	6	4	0,67	5	0	0
2016	BMRI	8	4	0,50	6	1	1
2016	BNBA	3	1	0,33	3	0	0
2016	BNGA	8	4	0,50	4	0	0
2016	BNII	6	3	0,50	4	1	1
2016	BNLI	8	4	0,50	4	0	0
2016	BSIM	3	2	0,67	3	0	0
2016	BSWD	3	1	0,33	3	0	0
2016	BTPN	6	3	0,50	4	1	1
2016	BVIC	4	2	0,25	4	0	0
2016	INPC	7	4	0,57	6	0	0
2016	MAYA	5	2	0,40	3	0	0
2016	MCOR	3	2	0,67	3	0	0
2016	MEGA	4	2	0,50	3	0	0
2016	NISP	8	4	0,50	3	0	0
2016	PNBN	6	3	0,50	3	0	0
2016	SDRA	4	3	0,75	5	0	0

LAMPIRAN 3

Daftar Kepemilikan Institusional

Tahun	Kode	Jumlah Saham Institusi	Jumlah Saham beredar	Total Kepemilikan Institusional
2013	AGRO	7037227337	7450781177	0,94
2013	BACA	2107635000	6397416110	0,33
2013	BBKP	4836574872	8500687441	0,57
2013	BBNI	18129767699	18648656458	0,97
2013	BBNP	578035160	676833882	0,85
2013	BBTN	6895719967	10564853500	0,65
2013	BDMN	7070578356	9584643365	0,74
2013	BEKS	9882982616	10755117153	0,92
2013	BJBR	7272218666	9696291166	0,75
2013	BMRI	14000000000	23333333333	0,60
2013	BNBA	2100000000	2310000000	0,91
2013	BNGA	24356324638	25131606843	0,97
2013	BNII	59318433838	60972156657	0,97
2013	BNLI	9514466498	10649247933	0,89
2013	BSIM	7498835150	13116881498	0,57
2013	BSWD	808289500	868000000	0,93
2013	BTPN	5732265884	5840287257	0,98
2013	BVIC	3525694369	6630268273	0,53
2013	INPC	6696599588	13088274241	0,51
2013	MAYA	3090061700	3478318200	0,89
2013	MCOR	1099253216	5910324430	0,19
2013	MEGA	4026599755	6963775206	0,58
2013	NISP	9760695612	11472648486	0,85
2013	PNBN	20438864437	24087645998	0,85
2013	SDRA	1481367675	2316373000	0,64
2014	AGRO	7037227337	7450781177	0,94
2014	BACA	1657635000	6397416110	0,26
2014	BBKP	5408431307	9086620432	0,60
2014	BBNI	18229231732	18648656458	0,98
2014	BBNP	577735160	676833882	0,85
2014	BBTN	6419597180	10567696000	0,61
2014	BDMN	7107837957	9584643365	0,74
2014	BEKS	9882982616	10755117153	0,92
2014	BJBR	7272218666	9696291166	0,75
2014	BMRI	14000000000	23333333333	0,60
2014	BNBA	2100000000	2310000000	0,91
2014	BNGA	24356324638	25131606843	0,97

2014	BNII	65909370730	67746840730	0,97
2014	BNLI	10590763612	11856954739	0,89
2014	BSIM	7861971522	14040168349	0,56
2014	BSWD	808289500	868000000	0,93
2014	BTPN	5736917284	5840287257	0,98
2014	BVIC	4034592772	7139166980	0,57
2014	INPC	6696599588	13088274241	0,51
2014	MAYA	3067184866	3478318200	0,88
2014	MCOR	1099253216	5910324430	0,19
2014	MEGA	4026599755	6963775206	0,58
2014	NISP	9760695612	11472648486	0,85
2014	PNBN	20438864437	24087645998	0,85
2014	SDRA	4061983762	5221339040	0,78
2015	AGRO	14453776056	11479715698	1,26
2015	BACA	2604580000	6404528162	0,41
2015	BBKP	5408431307	9086620432	0,60
2015	BBNI	17976936479	18498556457	0,97
2015	BBNP	554773223	676833882	0,82
2015	BBTN	7354000000	10582345000	0,69
2015	BDMN	7110358860	9584643365	0,74
2015	BEKS	9882982616	10755117153	0,92
2015	BJBR	7272218666	9696291166	0,75
2015	BMRI	1400000000	23333333333	0,60
2015	BNBA	2100000000	2310000000	0,91
2015	BNGA	24356324638	25131606843	0,97
2015	BNII	65909370963	67746840730	0,97
2015	BNLI	10590763612	11856954739	0,89
2015	BSIM	7861971522	14151999729	0,56
2015	BSWD	979089442	1041600000	0,94
2015	BTPN	5744317284	5840287257	0,98
2015	BVIC	3834593069	7139167280	0,54
2015	INPC	6696599588	13088274241	0,51
2015	MAYA	3769226119	4304418773	0,88
2015	MCOR	1099253216	6536286535	0,17
2015	MEGA	4026599755	6963775206	0,58
2015	NISP	9760695612	11472648486	0,85
2015	PNBN	20438864437	24087645998	0,85
2015	SDRA	4061983762	5221339040	0,78
2016	AGRO	14453776056	15325711820	0,94
2016	BACA	2349480000	7037943495	0,33
2016	BBKP	5408431307	9086620432	0,60

2016	BBNI	18049741820	18937998324	0,95
2016	BBNP	583581223	676833882	0,86
2016	BBTN	7354000000	10590000000	0,69
2016	BDMN	7087777795	9584643365	0,74
2016	BEKS	44922317813	64109430357	0,70
2016	BJBR	7272218666	9696291166	0,75
2016	BMRI	14000000000	23333333333	0,60
2016	BNBA	2100000000	2310000000	0,91
2016	BNGA	22991336581	23121606843	0,99
2016	BNII	65909370964	67746840730	0,97
2016	BNLI	19909138662	22313049821	0,89
2016	BSIM	8941161979	15251704336	0,59
2016	BSWD	979089442	1041600000	0,94
2016	BTPN	3993580148	5840287257	0,68
2016	BVIC	4595500580	7890653827	0,58
2016	INPC	6696599588	13088274241	0,51
2016	MAYA	4336490000	4919335740	0,88
2016	MCOR	10122087169	16631460751	0,61
2016	MEGA	4026599755	6963775206	0,58
2016	NISP	9760695612	11472648486	0,85
2016	PNBN	20438864437	24087645998	0,85
2016	SDRA	4061983762	5221339040	0,78

LAMPIRAN 4

Tax Avoidance

Tahun	Kode	Laba Sebelum Pajak	Pembayaran Pajak	Cash ETR
2013	AGRO	2.878.764.000.000	132.918.540.000	0,05
2013	BACA	93.343.000.000	10.987.000.000	0,12
2013	BBKP	1.216.000.000.000	210.619.000.000	0,17
2013	BBNI	11.278.000.000.000	1.528.370.000.000	0,14
2013	BBNP	141.923.108.000	28.227.356.000	0,20
2013	BBTN	2.141.000.000.000	437.556.000.000	0,20
2013	BDMN	5.530.000.000.000	1.447.263.000.000	0,26
2013	BEKS	123.665.000.000	33.664.000.000	0,27
2013	BJBR	1.752.874.000.000	323.132.000.000	0,18
2013	BMRI	24.061.837.000.000	3.266.066.000.000	0,14
2013	BNBA	78.855.000.000	21.178.025.500	0,27
2013	BNGA	5.832.017.000.000	1.324.103.000.000	0,23
2013	BNII	934.117.000.000	74.129.000.000	0,08
2013	BNLI	2.306.134.000.000	514.444.000.000	0,22
2013	BSIM	286.100.000.000	44.264.000.000	0,15
2013	BSWD	2.306.134.000.000	514.444.000.000	0,22
2013	BTPN	2.878.764.000.000	354.193.000.000	0,12
2013	BVIC	509.628.000.000	104.657.281.000	0,21
2013	INPC	293.613.000.000	33.874.000.000	0,12
2013	MAYA	509.628.000.000	104.657.281.000	0,21
2013	MCOR	119.560.000.000	1.576.000.000	0,01
2013	MEGA	632.550.000.000	270.838.000.000	0,43
2013	NISP	1.529.716.000.000	301.858.000.000	0,20
2013	PNBN	3.252.163.000.000	831.757.000.000	0,26
2013	SDRA	123.665.000.000	33.664.000.000	0,27
2014	AGRO	2.543.990.000.000	133.290.230.000	0,05
2014	BACA	99.373.000.000	24.612.000.000	0,25
2014	BBKP	899.000.000.000	210.619.000.000	0,23
2014	BBNI	13.524.000.000.000	2.888.385.000.000	0,21
2014	BBNP	130.448.583.000	33.392.345.000	0,26
2014	BBTN	1.579.000.000.000	453.656.000.000	0,29
2014	BDMN	3.553.000.000.000	1.561.180.000.000	0,44
2014	BEKS	138.073.000.000	39.132.000.000	0,28
2014	BJBR	1.438.489.000.000	367.536.000.000	0,26
2014	BMRI	26.008.015.000.000	5.911.725.000.000	0,23
2014	BNBA	70.542.000.000	20.377.155.194	0,29
2014	BNGA	3.200.169.000.000	1.474.039.000.000	0,46

2014	BNII	659.006.000.000	77.192.000.000	0,12
2014	BNLI	2.047.287.000.000	580.041.000.000	0,28
2014	BSIM	200.895.000.000	26.807.000.000	0,13
2014	BSWD	2.047.287.000.000	580.041.000.000	0,28
2014	BTPN	2.543.990.000.000	716.903.000.000	0,28
2014	BVIC	571.976.000.000	133.290.230.000	0,23
2014	INPC	180.166.000.000	29.152.000.000	0,16
2014	MAYA	571.976.000.000	133.290.230.000	0,23
2014	MCOR	71.482.000.000	9.169.000.000	0,13
2014	MEGA	659.006.000.000	96.730.000.000	0,15
2014	NISP	1.776.712.000.000	370.933.000.000	0,21
2014	PNBN	3.676.997.000.000	868.465.000.000	0,24
2014	SDRA	138.073.000.000	39.132.000.000	0,28
2015	AGRO	2.432.611.000.000	135.147.613.000	0,06
2015	BACA	119.648.000.000	28.798.000.000	0,24
2015	BBKP	1.179.000.000.000	235.872.000.000	0,20
2015	BBNI	11.466.000.000.000	3.301.810.000.000	0,29
2015	BBNP	90.314.736.000	35.280.526.000	0,39
2015	BBTN	2.542.000.000.000	358.876.000.000	0,14
2015	BDMN	3.281.000.000.000	1.322.196.000.000	0,40
2015	BEKS	265.230.000.000	56.739.000.000	0,21
2015	BJBR	1.766.397.000.000	310.240.000.000	0,18
2015	BMRI	26.369.430.000.000	5.716.817.000.000	0,22
2015	BNBA	77.646.000.000	19.112.316.692	0,25
2015	BNGA	570.004.000.000	34.967.000.000	0,06
2015	BNII	1.238.769.000.000	82.160.000.000	0,07
2015	BNLI	293.535.000.000	129.495.000.000	0,44
2015	BSIM	238.953.000.000	33.754.000.000	0,14
2015	BSWD	483.641.000.000	218.384.000.000	0,45
2015	BTPN	2.432.611.000.000	826.438.000.000	0,34
2015	BVIC	878.213.000.000	135.147.613.000	0,15
2015	INPC	84.258.000.000	28.077.000.000	0,33
2015	MAYA	878.213.000.000	135.147.613.000	0,15
2015	MCOR	96.528.000.000	25.186.000.000	0,26
2015	MEGA	1.238.769.000.000	82.160.000.000	0,07
2015	NISP	2.001.461.000.000	374.060.000.000	0,19
2015	PNBN	2.457.684.000.000	1.127.809.000.000	0,46
2015	SDRA	265.230.000.000	56.739.000.000	0,21
2016	AGRO	26.017.824.000.000	222.935.011.000	0,01
2016	BACA	121.390.000.000	28.492.000.000	0,23
2016	BBKP	1.077.000.000.000	232.880.000.000	0,22

2016	BBNI	12.938.000.000.000	3.470.990.000.000	0,27
2016	BBNP	103.729.155.000	22.786.474.000	0,22
2016	BBTN	2.670.000.000.000	674.413.000.000	0,25
2016	BDMN	4.919.000.000.000	1.924.029.000.000	0,39
2016	BEKS	291.802.000.000	53.288.000.000	0,18
2016	BJBR	1.531.288.000.000	260.088.000.000	0,17
2016	BMRI	27.571.890.000.000	5.299.131.000.000	0,19
2016	BNBA	73.675.000.000	19.473.950.216	0,26
2016	BNGA	1.112.238.000.000	272.129.000.000	0,24
2016	BNII	872.181.000.000	123.792.000.000	0,14
2016	BNLI	671.772.000.000	404.763.000.000	0,60
2016	BSIM	253.483.000.000	20.566.000.000	0,08
2016	BSWD	578.009.000.000	404.763.000.000	0,70
2016	BTPN	2.392.810.000.000	689.364.000.000	0,29
2016	BVIC	989.112.000.000	222.935.011.000	0,23
2016	INPC	129.839.000.000	60.105.000.000	0,46
2016	MAYA	991.178.000.000	222.935.011.000	0,22
2016	MCOR	81.442.000.000	19.804.000.000	0,24
2016	MEGA	1.479.916.000.000	123.792.000.000	0,08
2016	NISP	2.153.891.000.000	464.822.000.000	0,22
2016	PNBN	3.002.762.000.000	1.162.486.000.000	0,39
2016	SDRA	230.418.000.000	53.288.000.000	0,23

LAMPIRAN 5

Price Book Value

Tahun	Kode	Saham Beredar	Nilai Nominal	Price Book Value
2013	AGRO	118	112,3247321	1,05
2013	BACA	88	141,6806386	0,62
2013	BBKP	620	730,9254743	0,85
2013	BBNI	3950	2556,940502	1,54
2013	BBNP	1480	1554,883743	0,95
2013	BBTN	870	1093,886725	0,80
2013	BDMN	3775	3292,035165	1,15
2013	BEKS	84	69,21421584	1,21
2013	BJBR	890	692,8695606	1,28
2013	BMRI	7850	3805,311257	2,06
2013	BNBA	157	244,330303	0,64
2013	BNGA	845	1030,045041	0,82
2013	BNII	310	2007,611469	0,15
2013	BNLI	1260	1326,539122	0,95
2013	BSIM	240	209,9782635	1,14
2013	BSWD	650	524,0345622	1,24
2013	BTPN	4300	1696,46878	2,53
2013	BVIC	125	248,0708068	0,50
2013	INPC	91	199,5544219	0,46
2013	MAYA	2750	693,5317189	3,97
2013	MCOR	127	175,1814155	0,72
2013	MEGA	2050	878,6189702	2,33
2013	NISP	1230	1176,411185	1,05
2013	PNBN	660	828,5754864	0,80
2013	SDRA	890	249,450326	3,57
2014	AGRO	103	121,3325125	0,85
2014	BACA	96	152,2791363	0,63
2014	BBKP	750	750,7169526	1,00
2014	BBNI	6100	3272,155725	1,86
2014	BBNP	2310	1681,507132	1,37
2014	BBTN	1205	1159,467021	1,04
2014	BDMN	4525	3444,835947	1,31
2014	BEKS	80	60,03718889	1,33
2014	BJBR	730	730,5480909	1,00
2014	BMRI	10775	4493,338371	2,40
2014	BNBA	158	260,6666667	0,61
2014	BNGA	595	1131,948871	0,53

2014	BNII	208	216,246999	0,96
2014	BNLI	1505	1441,730729	1,04
2014	BSIM	339	225,1028564	1,51
2014	BSWD	1100	645,8387097	1,70
2014	BTPN	3950	2065,058356	1,91
2014	BVIC	120	246,5034093	0,49
2014	INPC	79	207,7642896	0,38
2014	MAYA	1880	820,0037593	2,29
2014	MCOR	205	206,4419668	0,99
2014	MEGA	2000	998,9804085	2,00
2014	NISP	1360	1299,366578	1,05
2014	PNBN	1165	964,3409324	1,21
2014	SDRA	1150	747,7516725	1,54
2015	AGRO	97	117,8088409	0,82
2015	BACA	205	164,4798763	1,25
2015	BBKP	700	829,2608959	0,84
2015	BBNI	4990	4240,234755	1,18
2015	BBNP	1860	1766,301942	1,05
2015	BBTN	1295	1309,73872	0,99
2015	BDMN	3200	3569,757131	0,90
2015	BEKS	53	28,88578484	1,83
2015	BJBR	755	800,0190864	0,94
2015	BMRI	9250	5121,0789	1,81
2015	BNBA	190	534,1419913	0,36
2015	BNGA	835	1141,168059	0,73
2015	BNII	171	232,3837958	0,74
2015	BNLI	945	1586,65057	0,60
2015	BSIM	394	259,2998212	1,52
2015	BSWD	3595	1070,360983	3,36
2015	BTPN	2400	2384,105163	1,01
2015	BVIC	105	296,0695438	0,35
2015	INPC	64	211,3166296	0,30
2015	MAYA	1950	1065,666061	1,83
2015	MCOR	300	216,2897836	1,39
2015	MEGA	3275	1653,872312	1,98
2015	NISP	1275	1430,475885	0,89
2015	PNBN	820	1278,921527	0,64
2015	SDRA	1100	792,1207507	1,39
2016	AGRO	386	126,3400371	3,06
2016	BACA	206	186,8500367	1,10
2016	BBKP	640	1049,667703	0,61

2016	BBNI	5700	4712,958491	1,21
2016	BBNP	1910	1769,281993	1,08
2016	BBTN	1740	1806,471766	0,96
2016	BDMN	3710	3795,443462	0,98
2016	BEKS	57	13,48597227	4,23
2016	BJBR	3390	997,7243705	3,40
2016	BMRI	11575	6572,988129	1,76
2016	BNBA	200	561,3277056	0,36
2016	BNGA	920	1479,465603	0,62
2016	BNII	340	284,4797749	1,20
2016	BNLI	675	864,4984507	0,78
2016	BSIM	870	293,4309439	2,96
2016	BSWD	2050	1063,955453	1,93
2016	BTPN	2640	2793,086587	0,95
2016	BVIC	107	332,8330019	0,32
2016	INPC	73	338,0421986	0,22
2016	MAYA	3150	1433,826104	2,20
2016	MCOR	148	144,0753783	1,03
2016	MEGA	2550	1761,355104	1,45
2016	NISP	2070	1700,267904	1,22
2016	PNBN	750	1419,848166	0,53
2016	SDRA	1150	844,9729018	1,36